

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. 2007. *Menguak Tabir Hukum edisi ke 2*. Jakarta : Kencana.
- Akadun. 2007. *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Djafar, Muhammad. dan Saidi. 2011. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Raja Grafino Persada.
- Fuady, Munir. 2005. *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jono. 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2008. *Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara*. Jakarta; Pradnya Paramita.
- L.J. Van Apeldoorn. 1993. Terjemahan Octarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Muljadi, Kartini. 2001. *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*. Bandung: Alumni.
- Nating, Imran. 2005. *Peranan dan Tanggungjawab Kuratir Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nasution, Adnan Buyung. 2006. *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- R, Ibrahim. 1997. *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saliman, Abdul R. 2010. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Saliman, Abdul R., Hermansyah, dan Ahmad Jalis. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sari, Elsi kartika dan Advendi Simanunson. 2007. *Hukum Dalam Ekonomi Edisi ke II*. Jakarta; Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Shubhan, Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktek Di Pengadilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.

- Shubhan, Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sjahdaeni, Sutan Remy. 2009. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Graviti.
- Subekti. 2002. *Pergulatan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiharto. 2007. *Peran Strategis BUMN dalam Pembangunan Indonesia Hari ini dan Masa Depan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Susilowati, ETTY. 2013. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Semarang, Universitas Diponegoro.
- Suwardi. 2015. *Hukum Dagang Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tara, H.M. Azwir Dainy. 2003. *Menggugah BUMN Membangun Ekonomi Rakyat*, Jakarta ; Nuansa Madani.
- Tjandra, W Riawan. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1982. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2*. Jakarta : Djambatan.
- Widijowati, Rr. Dijan. 2012. *Hukum Dagang*. Yogyakarta: Andi.
- Wijaya, Guna Persadwan. 2009. *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

B. Internet, Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Ali, Chaidir. sebagaimana dikutip oleh Ridwan Khairandy. 2007. *Konsepsi Kekayaan Negara Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan*. Jurnal Hukum Bisnis. Vo.26-No.1: 33.
- Bagijo, Himawan Estu. 2000. *Posisi Hukum BUMN Persero Pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999*. Artikel pada Majalah Yuridika Vol. 15 No.5: 44.
- Hartono, Sri Rezeki. 1999, "Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modren", *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 7: 22.
- Khairandy, Ridwan. 2009. *Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan : Suatu Kajian Atas Makna Kekayaan Negara Yang Dipisahkan dan Keuangan Negara*. Jurnal Hukum No. 1, Vol. 16: 73.

Khairandy, Ridwan. 2013. *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikiya*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 20: 85.

Nuddin. 2000. Kerangka Dasar dan Arah Privatisasi BUMN. *Artikel pada Majalah Yuridika*, vol. 15 No. 6: 421

Soeria Admadja, Arifin P. Jurnal Hukum Bisnis. *Jurnal Hukum*. Vol. 26 No. 1 Tahun 2007

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keunagan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.